

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian

Konsep yang mendasari dalam penelitian ini diantaranya adalah tinjauan mengenai penyandang disabilitas sensorik netra, pemberdayaan, keterampilan vokasional, barista, dan pekerjaan sosial dalam pemberdayaan yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

2.1.1 Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas Sensorik Netra

2.1.1.1 Pengertian Disabilitas Sensorik Netra

Secara etimologis, istilah "tunanetra" berasal dari kata *tuna* yang berarti mengalami kerusakan, dan *netra* yang berarti mata. Dengan demikian, tunanetra merujuk pada individu yang mengalami gangguan atau kerusakan pada fungsi penglihatannya. Seseorang yang mengalami kebutaan total disebut buta, sedangkan tunanetra belum tentu kehilangan penglihatan secara keseluruhan. Artinya, semua individu yang buta termasuk tunanetra, namun tidak semua tunanetra mengalami kebutaan total, (Pradopo dalam Rahmah, 2020).

Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI, 2004) sebagai salah satu organisasi perkumpulan penyandang disabilitas netra menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas netra, yaitu: "mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) atau mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal dan dari jarak yang normal meskipun dibantu oleh kaca mata (*low vision*)".

Menurut Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas sensorik netra adalah seseorang yang menurut hasil pemeriksaan medis/ahli tidak dapat menghitung jari-jari tangan dengan menggunakan indranya pada jarak satu meter didepannya. Berdasarkan pengertian tersebut, secara umum penyandang disabilitas sensorik netra merujuk pada individu yang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi indera penglihatannya.

2.1.1.2 Klasifikasi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra

Sujtjihati & Somantri dalam Fransiska (2021) mengklasifikasikan tunanetra menjadi dua macam, yaitu, buta dan *low vision*, yaitu:

1. Buta Total (*Blind*), kondisi di mana seseorang benar-benar tidak memiliki kemampuan melihat, termasuk tidak dapat merasakan rangsangan cahaya sama sekali (ketajaman penglihatan atau *visus* bernilai nol). Individu dalam kategori ini tidak memiliki pengalaman visual sama sekali.
2. Buta Sebagian (*Low Vision*), merujuk pada kondisi ketika seseorang masih memiliki sisa penglihatan, namun sangat terbatas. Individu dengan *low vision* masih bisa menangkap cahaya dan memiliki refleks terhadap rangsangan visual, namun ketajaman penglihatannya berada di bawah normal—sekitar lebih dari 6/21—dan hanya mampu membaca huruf besar seperti judul utama surat kabar. Orang dengan kondisi ini masih bisa memanfaatkan penglihatan yang tersisa untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

The World Health Organization (WHO) membagi tunanetra ke dalam dua tipe yaitu:

1. *Blindness* (Kebutaan), didefinisikan sebagai ketajaman penglihatan yang lebih buruk dari 20/400 dengan koreksi terbaik atau bidang penglihatan kurang dari atau sama dengan 10 derajat. Seseorang dengan ketajaman penglihatan 20/400 dapat melihat pada jarak 20 kaki yang dilihat orang normal dengan jarak sejauh 400 kaki.
2. *Low vision* (penglihatan rendah), didefinisikan sebagai ketajaman penglihatan antara 20/70 dan 20/400 dengan koreksi terbaik atau bidang penglihatan kurang dari atau sama dengan 20 derajat. Seseorang dengan ketajaman penglihatan 20/70 dapat melihat pada jarak 20 kaki yang dilihat orang normal dengan jarak sejauh 70 kaki.

2.1.1.3 Faktor Penyebab Disabilitas Sensorik Netra

Disabilitas netra dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat bawaan maupun karena penyakit atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Terdapat beberapa penyebab utama yang dapat berkontribusi terhadap kondisi ini. Heather Mason, et.al menyebutkan beberapa penyebab ketunanetraan dalam Rahmah (2020) antara lain:

1. Faktor genetik atau herediter, beberapa gangguan penglihatan bersifat bawaan dan dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya.
2. Perkawinan sedarah, kasus tunanetra kerap ditemukan sebagai akibat dari hubungan pernikahan sedarah atau antarkerabat.
3. Komplikasi saat proses persalinan, gangguan penglihatan bisa terjadi karena adanya masalah saat kelahiran.

4. Penyakit yang akut, beberapa kondisi medis seperti infeksi virus, gangguan pada saraf mata, atau tumor otak yang menyerang pusat penglihatan dapat menimbulkan ketunanetraan.
5. Terjadinya kecelakaan, kecelakaan yang melibatkan area mata dapat menyebabkan kerusakan serius pada indera penglihatan.
6. Diakibatkan oleh penggunaan obat, konsumsi obat-obatan secara tidak sesuai, terutama dengan dosis berlebih, dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mata.
7. Kerusakan pada lapisan mata, infeksi akibat hewan atau mikroorganisme tertentu dapat merusak jaringan mata yang sensitif dan mengakibatkan gangguan penglihatan.
8. Daerah yang memiliki suhu udara panas sehingga mengakibatkan udara tidak stabil dan membawa bibit penyakit trachoma di daerah yang kering.

Sutjihati & Somantri mengemukakan dalam Fransiska (2021) bahwa Faktor penyebab seseorang menjadi penyandang disabilitas sensorik netra umumnya dibedakan ke dalam dua kategori utama, adalah :

1. Faktor Internal merupakan penyebab yang berkaitan dengan aspek keturunan serta proses perkembangan janin selama dalam kandungan, dan sering disebut sebagai faktor genetik atau herediter. Ciri yang disebabkan oleh faktor keturunan adalah bola mata normal tetapi tidak dapat menerima energi positif dari sinar atau sinar yang terkadang menyebabkan seluruh bola mata tertutup selaput putih atau keruh.
2. Faktor Eksternal atau faktor luar, diantaranya:

- 1) *Illness*, Penyebab gangguan penglihatan bisa berasal dari infeksi virus seperti rubella, yang memicu gejala campak akut disertai demam tinggi. Infeksi ini dapat mengganggu sistem saraf sensorik penglihatan dan berujung pada kerusakan permanen. Selain itu, kondisi seperti infeksi sifilis, degenerasi organ mata, atau kekeruhan pada lensa juga dapat menjadi pemicu disabilitas netra.
- 2) Kecelakaan, trauma fisik akibat benturan, jatuh, atau cedera lainnya bisa merusak saraf mata secara langsung maupun memengaruhi saraf tubuh lain yang berperan dalam fungsi penglihatan, termasuk saraf tulang belakang. Selain itu, paparan sinar ultraviolet atau zat kimia beracun juga dapat merusak kemampuan visual. Dari sisi psikologis, tekanan emosional berat seperti stres, depresi, atau luka batin mendalam juga dapat berdampak pada terganggunya fungsi penglihatan secara permanen.

2.1.1.4 Karakteristik Penyandang Disabilitas Sensorik Netra

Kondisi penyandang disabilitas sensorik tunanetra menurut Sutjihati & Somantri dalam Fransiska (2021) yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki ketajaman visual di bawah standar normal, individu menunjukkan ketajaman penglihatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang memiliki fungsi penglihatan normal.
2. Lensa mata mengalami gangguan kejernihan, terjadi kekeruhan atau keberadaan zat cair tertentu pada lensa mata yang menghambat penglihatan.
3. Kesulitan dalam mengontrol pergerakan mata, posisi mata tidak stabil atau sulit diarahkan karena gangguan pada kontrol saraf otak.
4. Terdapat kerusakan pada sistem saraf otak yang mengatur penglihatan pada bagian yang berfungsi untuk memproses rangsangan visual.

Selain ciri-ciri tersebut, (Hosni dalam Fransiska, 2021) menyebutkan bahwa seorang tunanetra memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Hanya mengenal bentuk dan obyek (sedikit sisa penglihatan)
2. Hanya dapat menghitung jari dari berbagai jarak
3. Tidak dapat melihat tangan yang digerakkan
4. Hanya dapat membedakan gelap, terang atau persepsi cahaya tetapi masih dapat menunjuk sumber cahaya
5. Tidak mempunyai persepsi cahaya (buta total).

2.1.1.5 Hambatan yang dialami Disabilitas Sensorik Netra

Tarsidi mengemukakan dalam Arianto & Apsari (2022) beberapa hambatan yang ditemui oleh penyandang disabilitas sensorik netra di Indonesia. Hambatan dapat berasal dari internal dan juga eksternal diri seorang penyandang disabilitas. Hambatan tersebut meliputi:

1. Hambatan Eksternal
 - 1) Hambatan arsitektural (aksesibilitas)

Faktor aksesibilitas memiliki peran penting dalam mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, mereka sering menghadapi hambatan fisik akibat desain bangunan dan lingkungan yang tidak inklusif, seperti tidak tersedianya jalur landai, lift atau eskalator, pintu otomatis, toilet yang ramah disabilitas, petunjuk dalam huruf Braille, pembeda visual untuk landmark, area parkir khusus, serta sistem keamanan yang kurang mendukung kebutuhan mereka.

2) Hambatan informasi & hambatan komunikasi

Kurangnya informasi yang tersedia dalam format yang mudah diakses di fasilitas pelayanan publik menjadi penghalang tersendiri bagi penyandang disabilitas. Misalnya, bagi tunanetra, informasi idealnya disediakan dalam bentuk huruf Braille atau tanda khusus yang dapat dikenali secara taktil. Sementara itu, penyandang disabilitas runtu membutuhkan informasi yang disampaikan secara visual atau didampingi oleh petugas yang mampu berkomunikasi dalam bahasa isyarat.

2. Hambatan Internal

1) Kurang rasa percaya diri

Dengan keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas, adanya rasa kurang percaya diri yang menyebabkan penyandang disabilitas menutup diri.

2) Kurangnya keterampilan komunikasi yang baik, Sikap tertutup yang ditunjukkan oleh sebagian penyandang disabilitas turut memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalin komunikasi yang efektif. Hal ini berakibat pada terbatasnya interaksi sosial mereka di lingkungan masyarakat.

3) Penguasaan pengetahuan umum yang tidak memadai, Kondisi fisik maupun psikologis yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sering kali menjadi kendala dalam mengakses informasi dan memperoleh kesempatan belajar, sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan umum yang mereka miliki.

2.1.1.6 Keterampilan yang Perlu dikuasai Disabilitas Sensorik Netra

Menurut Nawawi dalam Imansyah dan Muhid (2022) terdapat empat hal yang perlu dikuasai oleh penyandang disabilitas sensorik netra diantaranya meliputi:

1. *Community Survival Skill*, yaitu bagaimana penyandang disabilitas sensorik netra bisa membentengi kehidupannya dalam masyarakat umum. Dalam hal ini ada empat keterampilan yang harus dikuasai diantaranya:
 - 1) Keterampilan akademis, yaitu keterampilan membaca, menulis, mengenal waktu, mengenal angka, ukuran, dll.
 - 2) Keterampilan manajemen ekonomi, yaitu keterampilan mengelola keuangan seperti mengatur, memegang uang, belanja, menabung, dll.
 - 3) Keterampilan kewarganegaraan, yaitu memahami norma yang ada dalam masyarakat dan negar, hak warga negara, menggunakan pelayanan masyarakat seperti tempat ibadah, pusat pembelanjaan, kantor, PLN, dll.
 - 4) Keterampilan komunikasi pada masyarakat, yaitu mengetahui layanan yang ada di masyarakat.
2. *Personal care skill*, yaitu keterampilan memelihara diri dalam kebiasaan sehari-hari yang meliputi:
 - 1) Kebiasaan pribadi seperti, makan, memelihara kamar mandi, menggunakan sabun, menggosok gigi, menggunakan deodorant, memotong kuku, merawat rambut, dll
 - 2) Menata rumah tangga seperti, merapikan rumah, memelihara pakaian, menentukan model berpakaian, dll
3. *Interpersonal competence skill*, yaitu merujuk pada kemampuan seseorang dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, menjalin pertemanan, keberanian untuk memperkenalkan diri, serta keterampilan gerak tubuh yang selaras, fleksibel, seimbang, dan disertai dengan rasa tanggung jawab.

- 1) Keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan
- 2) Kebiasaan dasar dalam bekerja, seperti mengikuti aturan dan tata tertib, kemandirian bekerja, mengambil keputusan, menggunakan dan memelihara alat, bisa menerima kritikan.
- 3) Tingkah laku dalam berkerja, seperti mengenali diri sebagaimana bekerja, mengetahui arti kerja

2.1.2 Tinjauan tentang Pemberdayaan

2.1.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar dapat berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 1 (6).

Menurut Jim Ife dalam Zuhaedi & Harmawan (2024), konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (“daya”) dan konsep *disadvantaged* (“ketimpangan”). Pemberdayaan ditinjau dari perspektif pluralis, Ife & Tesoriero (2016) mengatakan bahwa Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk membantu individu atau kelompok yang terpinggirkan agar mampu berkompetisi secara lebih optimal dengan kepentingan-kepentingan lain. Proses ini dilakukan dengan cara membekali mereka kemampuan dalam melakukan advokasi, memanfaatkan media, terlibat dalam kegiatan politik, serta memahami dan menggunakan sistem yang ada secara strategis.

Kelompok yang kurang beruntung dianggap sebagai kaum yang dirugikan yang diantaranya merujuk pada kelompok manula (manusia lanjut usia),

penyandang cacat (fisik dan mental), mereka yang terisolasi, mereka yang hidup di wilayah terpencil, dan kaum homo serta lesbian. Mereka yang menjadi bagian dari kelompok ini adalah kaum yang paling dirugikan dalam masyarakat dan harus dipertimbangkan secara jelas setiap strategi pemberdayaan untuk melawakan keadaan-keadaan yang merugikan mereka. (Ife & Tesoriero, 2016).

Menurut Zimmerman (1995) Pemberdayaan adalah kerangka kerja yang membantu masyarakat dalam memahami cara mereka untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan peluang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Teori pemberdayaan adalah model yang membantu orang dalam memahami bagaimana mereka mendapatkan kendali atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana cara mereka meningkatkan kualitas hidup di masyarakat dan juga memahami bagaimana meningkatkan efektivitas suatu organisasi.

Robert Adams (2008) juga mendefinisikan bahwa Pemberdayaan mengacu pada kemampuan individu, kelompok, atau komunitas dalam mengelola situasi yang mereka hadapi, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, serta mencapai tujuan yang mereka tentukan sendiri. Pemberdayaan juga mencakup proses di mana seseorang, baik secara personal maupun bersama-sama, dapat mendukung dirinya sendiri dan orang lain untuk meningkatkan kualitas hidup secara maksimal.

Pemberdayaan sering kali ditujukan kepada anggota kelompok yang dikecualikan dari proses pengambilan keputusan akibat diskriminasi sosial, misalnya melalui diskriminasi berdasarkan disabilitas, ras, etnis, agama, atau gender. Dalam pekerjaan sosial, pemberdayaan menawarkan pendekatan yang memungkinkan pekerja sosial meningkatkan kapasitas untuk membantu diri

kliennya secara mandiri. Misalnya saja, hal ini memungkinkan klien untuk tidak dilihat sebagai 'korban' yang pasif dan tidak berdaya untuk diselamatkan, melainkan sebagai orang yang berdaya melawan kekerasan/penindasan; pertarungan, di mana pekerja sosial mengambil posisi sebagai fasilitator, bukan sebagai 'penyelamat'. (Adams, 2008)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pemberdayaan adalah proses pemberian daya atau kekuatan kepada individu atau kelompok, terutama yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara efektif dan memiliki kontrol lebih besar atas kehidupan mereka. Pemberdayaan juga merupakan kerangka kerja yang membantu masyarakat memahami cara memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan peluang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Teori pemberdayaan menjadi model yang membantu orang memahami bagaimana mereka mendapatkan kendali atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2.1.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Huda menjelaskan dalam Rahmat et. al (2020) bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas individu atau masyarakat dalam membuat keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka ambil terkait dengan diri mereka sendiri. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, yang dapat menghalangi mereka dalam mengambil tindakan. Dengan demikian, pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kekuatan dan kontrol kepada individu atau masyarakat agar mereka dapat mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terhadap hidup mereka.

2.1.2.3 Aspek-Aspek Pemberdayaan

Menurut Ife dan Tesoriero (2014) menyebutkan bahwa Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan argumentasi dan konsepsi tersebut pemberdayaan dapat dilihat dari empat aspek yakni:

1. Sumber daya

Ife & Tesoriero (2016: 143) menyatakan bahwa “Banyak orang memiliki akses yang relatif kecil pada sumber daya, dan belum leluasa memanfaatkan sumber daya. Hal ini berlaku baik untuk sumber daya keuangan maupun untuk sumber daya non-keuangan”. Cholsin (2011) juga menegaskan bahwa Salah satu strategi dalam pemberdayaan adalah dengan memperkuat kapasitas individu melalui perluasan akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi, seperti permodalan, teknologi, informasi, peluang kerja, dan akses pasar.

Proses pemberian sumberdaya dalam pemberdayaan untuk kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dilakukan dengan meningkatkan akses mereka terhadap sumberdaya finansial seperti modal, pendapatan atau upah kerja dan sumberdaya non finansial seperti lapangan pekerjaan, teknologi serta fasilitas. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dan daya kelompok rentan tersebut dalam mengembangkan potensi mereka.

2. Kesempatan

Ife dan Tesoriero (2016) menyatakan bahwa kesempatan dapat dimaknai

sebagai peluang yang dimiliki individu untuk mengarahkan pilihan hidup dan profesinya. Melalui kesempatan tersebut, seseorang diberi otoritas dalam mengambil keputusan yang akan memengaruhi masa depannya. Memberikan kesempatan juga berarti memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks pemberdayaan, dikenal adanya delapan bentuk kekuasaan yang saling berkaitan, salah satunya adalah kekuasaan dalam bentuk ide atau gagasan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan harus memberikan setiap individu kebebasan untuk menyampaikan ide dalam diskusi tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Pemberian kesempatan dalam pemberdayaan berarti memberikan akses kepada individu atau kelompok rentan untuk mempermudah mereka dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan demi meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan sendiri mengacu pada kemampuan individu atau kelompok rentan untuk ikut serta dalam proses pembangunan serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka. (Swift dan Levin dalam Margayaningsih, 2016).

Proses pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas sensorik netra merupakan aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang inklusif. Individu dengan keterbatasan penglihatan berhak mendapatkan akses yang setara untuk menyampaikan pendapat, pengambilan keputusan, serta berpartisipasi aktif dalam forum diskusi maupun proses pengambilan keputusan. Ruang partisipasi yang terbuka bagi kelompok rentan ini mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan atas kontribusi mereka dengan memandang penyandang disabilitas sebagai warga negara yang setara dan bermartabat.

3. Pengetahuan

Menurut Ife & Tesoriero (2016) menjelaskan proses pemberdayaan melalui transfer pengetahuan mengacu pada upaya membuka akses edukasi dan informasi bagi setiap individu, agar mereka mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Informasi yang dimaksud menurut (Ife & Tesoriero, 2016:586) adalah:

Informasi mengenai berbagai sumber eksternal, seperti berbagai petunjuk pembiayaan, keahlian, berbagai pedoman, serta berbagai paket pelatihan. Informasi ini penting disampaikan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan merencanakan proses pemberdayaan masyarakat.

Pemberian pengetahuan atau pemahaman yang dimaksud adalah memberikan wawasan, informasi, dan dan edukasi terhadap pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi diri mereka. Tujuan dari pemberian pengetahuan dalam proses pemberdayaan ini adalah untuk mempermudah kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas sensorik netra, dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri.

4. Keterampilan

Ife & Tesoriero (2016) menjelaskan bahwa pelatihan dapat dirancang secara lebih terfokus sesuai dengan dinamika ekonomi yang sedang berkembang, guna membekali individu dengan keterampilan yang relevan agar mereka mampu mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi secara produktif dalam dunia kerja. Aspek pemberian keterampilan berkaitan dengan pelatihan yang disesuaikan dengan program pemberdayaan melalui keterampilan vokasional. Melalui pelatihan keterampilan, kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, dapat

meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakses pekerjaan dan menjadi lebih produktif dalam berkegiatan. Keterampilan yang diberikan meliputi kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, berkomunikasi, membuat keputusan, serta mengelola waktu yang mencerminkan potensi mereka dalam kegiatan keterampilan yang ditekuni.

2.1.2.4 Proses Pemberdayaan

Depdiknas menyebutkan dalam Dwiyanto & Jemadi (2020) proses bisa diartikan sebagai runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dipahami sebagai rangkaian proses perubahan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan memiliki kekuatan dalam mengelola kehidupannya. Wilson dalam Dwiyanto & Jemadi (2020) memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:

1. *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini individu atau masyarakat mulai dikenalkan dan disadarkan terhadap potensi yang mereka miliki, baik berupa keterampilan, sikap, maupun kemampuan, serta diarahkan untuk membentuk harapan dan tujuan hidup yang lebih baik.
2. *Understanding* atau pemahaman, masyarakat tidak hanya disadarkan, tetapi juga diberikan pemahaman baru tentang identitas diri, aspirasi, dan realitas sosial yang mereka hadapi. Dalam proses ini, mereka belajar untuk mengapresiasi makna dari pemberdayaan dan memahami tuntutan yang datang dari lingkungan sosial mereka.
3. *Harnessing* atau memanfaatkan, Setelah memiliki kesadaran dan pemahaman

yang cukup, masyarakat mulai mengambil langkah untuk memanfaatkan potensi dan pengetahuan yang dimiliki demi mendukung kepentingan dan kemajuan komunitas.

4. *Using* atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, keterampilan dan kemampuan yang diperoleh dari proses pemberdayaan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup.

Proses pemberdayaan menurut Zimmerman (2012:26) meliputi beberapa aspek yang diantaranya:

“Empowering processes are ones in which attempts to gain control, obtain needed resources, and critically understand one’s social environment are fundamental. The process is empowering if it helps people develop skills so they can become independent problem-solvers and decision-makers”

(Proses pemberdayaan adalah proses di mana upaya untuk mendapatkan kontrol, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, dan memahami lingkungan sosialnya secara kritis adalah hal yang bersifat fundamental. Proses ini dikatakan memberdayakan apabila hal ini dapat menolong orang dalam mengembangkan keterampilan sehingga mereka dapat memecahkan masalah dan membuat keputusan secara mandiri)

Zimmerman (2012) juga menjelaskan proses pemberdayaan pada tingkat individu bahwasannya meliputi 3 aspek, diantaranya:

1. *Learning desicion-making skills.*

Pemberdayaan individu dimulai dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan tepat. Aspek ini melibatkan proses di mana individu belajar untuk mengevaluasi pilihan-pilihan yang tersedia, mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang diambil, serta mengidentifikasi tujuan dan nilai yang ingin dicapai. Dengan keterampilan ini, individu menjadi lebih percaya diri dalam

mengambil langkah-langkah penting dalam kehidupan mereka, baik dalam konteks pribadi maupun profesional.

2. *Managing resources*

Pemberdayaan individu dimulai dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan tepat. Aspek ini melibatkan proses di mana individu belajar untuk mengevaluasi pilihan-pilihan yang tersedia, mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang diambil, serta mengidentifikasi tujuan dan nilai yang ingin dicapai. Dengan keterampilan ini, individu menjadi lebih percaya diri dalam mengambil langkah-langkah penting dalam kehidupan mereka, baik dalam konteks pribadi maupun profesional.

3. *Working with others*

Pemberdayaan individu juga melibatkan kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Aspek ini menekankan pentingnya keterampilan interpersonal dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Dengan bekerja sama, individu dapat memanfaatkan keahlian, pengalaman, dan perspektif orang lain, yang pada gilirannya dapat mempercepat pencapaian tujuan. Pemberdayaan dalam hal ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang saling mendukung, serta mengatasi konflik atau perbedaan yang mungkin timbul dalam proses kolaborasi.

2.1.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip fundamental yang menjadi dasar dari pemberdayaan dalam Najiati et al. (2005) yaitu:

1. Kesetaraan

Prinsip ini merupakan hal utama dalam proses pemberdayaan. Hal ini karena kesetaraan antara masyarakat dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan berpotensi memaksimalkan pengembangan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian satu sama lain. Prinsip kesetaraan diharapkan bisa mendorong proses saling belajar di antara dua belah pihak.

2. Partisipasi

Partisipasi merupakan prinsip penting dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, program pemberdayaan komunitas harus dirancang secara partisipatif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. Meskipun demikian, untuk mencapai tahap ini, diperlukan waktu dan pendampingan yang intensif dari fasilitator yang berdedikasi. Dalam lingkungan seperti ini, masyarakat terbiasa berpikir kreatif dan bertanggung jawab atas pilihan serta konsekuensi yang mereka ambil.

3. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini memandang orang miskin sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Semua kualitas yang dimiliki harus digali untuk modal dalam pemberdayaan. Bantuan pihak lain dalam proses pemberdayaan dianggap hanya sekadar penunjang. Dengan begitu, program pemberdayaan diharapkan tidak akan melemahkan keswadayaan komunitas.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan sebaiknya dirancang secara berkelanjutan. Pada awal pelaksanaan, peran pendamping akan lebih dominan kemudian diharapkan terus berkurang seiring dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menangani kegiatan atau urusannya sendiri. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berskala proyek sementara akibat batas waktu ataupun pendanaannya.

2.1.2.6 Model-Model Pemberdayaan

Budaraga et al. (2024) menjelaskan mengenai beberapa model dalam pemberdayaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Model Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Based Development Model*)

Model Pembangunan Berbasis Masyarakat (MPBM), masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan. Pendekatan ini mengakui bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menentukan kebijakan, program, dan proyek yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal, diharapkan kemandirian, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

2. Model Pendidikan Partisipatif (*Participatory Education Model*)

Model pendidikan partisipatif merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengambilan

keputusan. Pendekatan ini menggeser peran guru sebagai pemegang pengetahuan utama, dan mengakui bahwa siswa serta masyarakat memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keunikan yang dapat berkontribusi pada pembelajaran. Masyarakat diajak untuk berkolaborasi dalam merancang kurikulum, menyelenggarakan pelatihan, dan mengevaluasi hasil pendidikan, sehingga tercipta proses pembelajaran yang relevan, dan memberdayakan.

3. Model Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Empowerment Model*)

Model pemberdayaan ekonomi merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi individu, kelompok, atau komunitas. Pendekatan ini fokus pada pengembangan potensi ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro dan kecil, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta pembentukan koperasi dan jaringan usaha. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil kendali atas kehidupan ekonomi mereka sendiri, sehingga tercipta kemandirian dan keberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Model Pemberdayaan Politik (*Political Empowerment Model*)

Model pemberdayaan politik adalah kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi politik dan akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini bertujuan untuk memberdayakan individu dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan agar mereka dapat terlibat aktif dalam sistem politik, mempengaruhi kebijakan publik, dan memperjuangkan kepentingan mereka. Upaya ini mencakup pelatihan keterampilan advokasi, pemantauan kebijakan publik, dan pembentukan kelompok advokasi, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi.

5. Model Pemberdayaan Sosial (*Social Empowerment Model*)

Model pemberdayaan sosial adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri, dengan memperkuat hubungan sosial dan jaringan dukungan. Ini mencakup pembentukan kelompok komunitas, program pembinaan, dan advokasi hak-hak sosial untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antara individu, kelompok, organisasi, dan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan mereka secara kolektif.

6. Model Pemberdayaan Teknologi (*Technological Empowerment Model*)

Model Pemberdayaan Teknologi adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk memperkuat masyarakat atau organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Fokus utama dari model ini adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya penting, seperti informasi yang relevan, peluang pendidikan yang lebih luas, pasar kerja yang terjangkau, dan layanan publik yang efisien. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

7. Model Pemberdayaan Lingkungan (*Environmental Empowerment Model*)

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman dan perlindungan lingkungan sebagai inti dari pembangunan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui edukasi

mengenai keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta partisipasi aktif dalam kegiatan konservasi. Model pemberdayaan lingkungan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal agar mereka menjadi pelaku utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan yang mempengaruhi lingkungan sekitar mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan yang berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan

Menurut Anggraini et al. dalam Bella Khairina (2022) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan yaitu adalah faktor pendukung dan faktor penghambat, sebagai berikut :

1. Faktor pendukung

1) Keterlibatan anggota

Keterlibatan anggota ini dapat terlihat melalui partisipasi aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat sekitar, dengan kesediaan penuh untuk menjadi bagian serta melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

2) Sarana prasarana

Sarana prasarana merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan proses pemberdayaan dapat berjalan dengan baik serta mengurangi kendala teknis yang mungkin terjadi.

3) Keterlibatan masyarakat sekitar

Partisipasi masyarakat di luar anggota dapat menjadi faktor eksternal yang

memengaruhi kelancaran pemberdayaan. Keikutsertaan masyarakat merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan suatu program, karena keterlibatan mereka mencerminkan dukungan dalam mendukung keberlangsungan program tersebut.

4) Kerjasama dengan pihak lain

Faktor eksternal dapat berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Karena pemberdayaan masyarakat berlandaskan aspek sosial kemasyarakatan, maka diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkannya.

2. Faktor Penghambat

1) Ketidak disiplin anggota

Program yang dijalankan dapat mengalami hambatan jika masyarakat tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh kelompok. Kurangnya disiplin ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

2) Mindset yang salah

Sikap yang tertutup terhadap program yang akan dilaksanakan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah pola pikir agar masyarakat lebih peduli.

2.1.3 Tinjauan tentang Keterampilan Vokasional Barista

2.1.3.1 Pengertian tentang Keterampilan Vokasional

Keterampilan vokasional yaitu keterampilan yang dilatihkan untuk menghasilkan sebuah produk yang berguna serta berhubungan dengan masyarakat langsung. Keterampilan vokasional bagi penyandang disabilitas netra bertujuan

untuk meningkatkan kecakapan anak untuk mampu melakukan pekerjaan tertentu sesuai dengan bidang bakat dan minat yang dimilikinya (Iswari dalam Damri & Oktafia 2021).

Keterampilan yang memiliki nilai ekonomis disebut keterampilan vokasional, yaitu kemampuan yang berkaitan langsung dengan dunia kerja. Menurut Martono (2008), seseorang akan memiliki keterampilan jika ia belajar, berlatih, serta memiliki motivasi untuk melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Dengan demikian, keterampilan vokasional dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Farooq dalam Cendanarium & Supriyatno (2020) menjelaskan bahwa keterampilan vokasional adalah bentuk kegiatan yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan kemampuan yang dapat digunakan setelah menyelesaikan pendidikan. Istilah ini juga dikenal sebagai keterampilan kejuruan karena berhubungan dengan jenis pekerjaan tertentu yang ada di masyarakat. Keterampilan ini mengarahkan individu untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas kerja, menciptakan suatu karya, serta menghadapi tantangan kehidupan, baik di lingkungan sosial maupun dalam dunia kerja, secara produktif dan kreatif.

2.1.3.2 Pengertian Barista

Menurut Yulin dalam Heykal & Aripin (2018) barista bukan hanya sekedar orang yang “bertugas” untuk membuat kopi di kedai kopi. Lebih dari itu, mereka adalah seniman. Jadi, sepertinya sah jika kita, mengatakan bahwa profesi ini tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan yang sederhana, meskipun secara kasat mata terlihat mudah untuk dilakukan. Dalam berbagai kamus bahasa, barista diartikan

sebagai individu yang memiliki keahlian dalam meracik dan menyajikan minuman kopi berbasis espresso.

Secara umum, barista biasanya bekerja di kedai kopi, bar kopi, atau coffee shop hotel dan bertanggung jawab dalam mengoperasikan mesin espresso komersial yang tergolong kompleks. Tugas utama mereka mencakup pengaturan suhu dan tekanan yang tepat untuk menghasilkan espresso berkualitas tinggi, mengingat espresso dikenal sebagai minuman yang menuntut presisi. Oleh karena itu, membuat espresso secara manual dianggap sebagai pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Selain meracik kopi, barista juga menyiapkan berbagai jenis minuman sesuai pesanan dan menyajikannya langsung kepada pelanggan. Karena itu, barista dituntut tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu memberikan layanan terbaik serta menjalin interaksi yang baik dengan pelanggan.

Secara etimologis, istilah *barista* berasal dari Bahasa Italia yang merujuk pada *bartender*, yaitu seseorang yang menyajikan berbagai jenis minuman, tidak terbatas pada kopi saja. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya popularitas kopi di wilayah Amerika dan Eropa, istilah ini mulai digunakan secara lebih spesifik untuk merujuk pada penyaji minuman berbasis kopi. Di negara asalnya, Italia, istilah ini memiliki bentuk jamak yaitu *baristi* untuk pria dan *bariste* untuk wanita. Barista di beberapa café sistem kerjanya fleksibel dari membuat minuman sampai kasir, dan menjadi pelayan untuk mengantar dan membersihkan area *coffee shop*.

2.1.3.3 Standar Kompetensi Kerja Barista

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 2013 seorang barista harus memenuhi 9 unit kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Berikut SKKNI Barista yang tercantum pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Barista

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	I.563030.001.01	Mengelola Bahan Baku
2	I.563030.002.01	Mengelola Peralatan dan Perlengkapan
3	I.563030.003.01	Mengelola Area Kerja
4	I.563030.004.01	Menangani Pelanggan
5	I.563030.005.01	Mengoperasikan Peralatan
6	I.563030.006.01	Mengembangkan produk Minuman Kopi
7	PAR.UJ01.003.01	Mengikuti prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja
8	PAR.UJ01.004.01	Menangani Situasi Konflik
9	PAR.UJ03.044.01	Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

Sumber : LSP Barista Indonesia

3. Mengelola Bahan Baku

Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi identifikasi jumlah dan jenis bahan yang dibutuhkan, menetapkan jumlah dan kebutuhan bahan baku yang akan digunakan serta menyimpan bahan baku dengan benar. Jumlah, jenis, dan

bahan baku diidentifikasi serta ditetapkan berdasarkan SOP perusahaan. Selanjutnya, mutu dan kualitas bahan baku diperiksa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan mutu dan kualitas dalam unit kompetensi ini, meliputi tetapi tidak terbatas pada: masa kadaluarsa bahan, kesegaran bahan, dan kebersihan bahan. Setelah itu, seluruh informasi mengenai jumlah, jenis, dan kualitas bahan baku didokumentasikan secara sistematis. Bahan baku dikemas ulang menggunakan wadah yang telah disesuaikan dengan pedoman penyimpanan dari produsen asal bahan tersebut, kemudian disimpan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di perusahaan. Pengemasan yang dimaksud adalah proses penanganan ulang terhadap bahan baku yang belum habis digunakan. Sementara itu, standar penyimpanan merujuk pada penataan bahan baku sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis produk. Jenis bahan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini meliputi, tidak terbatas pada :

- 1) Biji kopi sangria/*roasted bean* : arabika dan robusta
- 2) Susu : *full cream, ultra high temperature*, rendah atau tanpa lemak, dan kental manis
- 3) Gula : pasir putih, pasir coklat/*brown sugar*, dan rendah kalori
- 4) Sirup
- 5) Saus
- 6) Bubuk perasa
- 7) Es batu
- 8) Air : mineral dan non mineral

2. Mengelola Peralatan dan Perlengkapan

Ruang lingkup penerapan unit kompetensi ini mencakup kegiatan menyiapkan, memeriksa, serta melakukan perawatan terhadap peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Peralatan dan perlengkapan dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Mesin Espresso: mesin espresso otomatis, mesin espresso semi otomatis, mesin espresso manual
- 2) Mesin kopi: *coffee urn, percolator*
- 3) Alat seduh manual: *French press/plunger, dripper, syphon, moka pot, ibrik*
- 4) Alat giling kopi : manual dan elektrik
- 5) Pemanas air
- 6) *Barista tools: tamper, knock box, tamping mat, stainless steel milk jug, kuas dan sikat/brushes, lap/towel, thermometer, dan times*
- 7) Alat ukur: timbangan, sendok ukur, gelas ukur/*shot glass*

3. Mengelola Area Kerja

Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mempersiapkan area kerja/working station dan mempersiapkan alat dan perlengkapan kerja. Dalam mempersiapkan alat dan perlengkapan kerja, seorang barista harus melakukan kalibrasi mesin kopi dan alat penggiling kopi sesuai SOP perusahaan, melakukan pengujian produk dari mesin dan alat penggiling kopi yang sedang dikalibrasi. Parameter hasil kalibrasi mesin dan alat penggiling kopi berdasarkan uji produk. Yang dimaksud dengan kalibrasi dalam unit kompetensi ini adalah melakukan penyesuaian ulang parameter mesin kopi dan alat penggiling kopi sesuai standar

yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang dimaksud dengan parameter dalam unit kompetensi ini tidak terbatas pada:

- 1) Suhu air yang direkomendasikan antara 90,5 – 96 derajat celcius untuk menyeduh kopi
- 2) Tekanan pompa air mesin espresso pada 8,5 – 9,5 bar
- 3) Waktu ekstraksi espresso yang direkomendasikan selama 20 – 30 detik
- 4) Menghasilkan volume espresso (termasuk crema) sebanyak 30ml (+/- 5ml)

Area kerja/working station dalam unit kompetensi ini adalah tempat menyimpan peralatan dan perlengkapan serta aktifitas kerja barista. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

- 1) Peralatan: kain pembersih meja, kain pembersih peralatan dan perlengkapan, sapu, kain pel lantai
 - 2) Perlengkapan: cairan pembersih, ember
4. Menangani Pelanggan

Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi melakukan komunikasi dengan setiap pelanggan yang datang dan mengerjakan produk. Yang dimaksud dengan produk yang ditawarkan dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Nama Produk
- 2) Bahan baku
- 3) Cita rasa
- 4) Proses pembuatan produk
5. Mengoperasikan Peralatan

Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menggunakan grinder/mesin penggiling, menggunakan mesin espresso dan menggunakan alat seduh manual yang digunakan sesuai kebutuhan. Dalam menggunakan grinder/mesin penggiling kopi, seorang barista harus menggiling sesuai metode seduh yang digunakan dan mengatur kehalusan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam menggunakan mesin espresso, seorang barista harus membuat espresso yang sesuai dengan teknik dan standar yang telah ditentukan berdasarkan *World Barista Championship*, melakukan steaming milk sesuai dengan SOP perusahaan, dan menggunakan peralatan yang sesuai dengan fungsinya berdasarkan SOP perusahaan. Yang dimaksud dengan membuat espresso sesuai dengan teknik dan standar dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Menggiling
- 2) Menakar
- 3) Memadatkan
- 4) Mengekstrak kopi
- 5) Mengerjakan dalam waktu efisien

Yang dimaksud dengan *steaming milk* meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Stretching
- 2) *Rolling*
- 3) Mengendalikan suhu susu sesuai dengan SOP perusahaan.

Dalam menggunakan alat seduh manual, seorang barista perlu melakukannya sesuai dengan yang digunakan dan menggunakan peralatan sesuai

fungsinya dengan benar berdasarkan SOP perusahaan. Yang dimaksud dengan metode seduh manual sesuai dengan yang digunakan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Menggiling
- 2) Menakar
- 3) Mengukur waktu seduh
- 4) Menyeduh kopi
- 5) Mengerjakan dalam waktu yang efisien
6. Mengembangkan produk Minuman Kopi

Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mencari referensi mengenai jenis-jenis minuman kopi terkini melalui sumber-sumber informasi yang terpercaya lalu informasi yang teridentifikasi didokumentasikan ke dalam file penyimpanan data. Dalam menerapkan informasi yang didapat guna memutakhirkan pengetahuan tentang produk minuman kopi, seorang barista perlu melakukan uji coba pengembangan produk yang dilakukan sesuai hasil identifikasi kemudian hasilnya dipresentasikan sesuai hasil identifikasi. Yang dimaksud dengan sumber informasi dalam unit kompetensi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Internet
- 2) Majalah
- 3) Surat kabar
- 4) Buku
- 5) Kolega
- 6) Lembaga pelatihan

7. Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan (K3) di Tempat Kerja

Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mengikuti prosedur tempat kerja dan memberikan umpan balik tentang kesehatan, keselamatan dan keamanan, menangani situasi darurat, dan menjaga standar persentasi perorangan yang aman. Penerapan K3 yang sesuai dengan kebijakan pemerintah diantaranya adalah:

- 1) Identifikasi Risiko
- 2) Pelatihan dan edukasi
- 3) Penerapan Prosedur Keselamatan
- 4) Inspeksi Rutin

Contoh penerapan K3 dalam kedai kopi adalah pastikan bahwa semua staf dilengkapi dengan APD seperti sarung tangan, kacamata, dan pelindung telinga jika diperlukan. Berikan tanda peringatan di sekitar area kerja yang berisiko dan memastikan bahwa semua peralatan seperti mesin kopi dan blender dilengkapi dengan tutup keamanan yang sesuai.

8. Menangani Situasi Konflik

Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mengidentifikasi situasi konflik yang mungkin dapat mengancam keamanan pribadi konsumen atau kolega dengan mengambil tindakan dengan cepat dan bijaksana serta mencari bantuan yang tepat agar konflik tidak bertambah buruk. Menangani situasi konflik yang meliputi tanggungjawab untuk memecahkan konflik yang terjadi dengan mempertimbangkan pandangan orang, keterampilan berkomunikasi secara efektif untuk membantu menangani konflik yang terjadi, dan teknik pemecahan konflik yang telah disepakati untuk menangani dan mengembangkan solusi. Memberi

tanggapan terhadap keluhan pelanggan yang meliputi keluhan ditangani secara sopan, dan bijaksana, menjelaskan keadaan secara rinci serta menyepakatinya bersama pelanggan, mengambil tindakan tepat untuk mengatasi keluhan demi kepuasan konsumen, menggunakan teknik untuk mengalihkan keluhan menjadi pujian, dan melengkapi dokumentasi yang diperlukan dengan akurat dan dalam batasan waktu tertentu. Situasi konflik ini tidak dicantumkan tetapi tidak dibatasi pada:

- 1) Keluhan konsumen
 - 2) Konflik diantara kolega pekerjaan
 - 3) Tamu yang ditolak
 - 4) Pecandu obat atau alcohol
 - 5) Pengusiran dari tempat kerja
 - 6) Konsumen yang menunda-nunda
9. Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi berkomunikasi dengan pelanggan dan kolega mengenai hal hal yang berkaitan dengan kegiatan dasar dan sehari-hari ditempat kerja serta kegiatan pelayanan pelanggan yang meliputi istilah, ungkapan, dan bahasa tubuh untuk memperjelas komunikasi secara lisan untuk dimengerti dan digunakan, mengerti dan menggunakan kalimat yang sopan dan ramah, serta mengetahui kapan harus memakai kalimat resmi atau tidak. Berbicara melalui telepon dengan memberikan salam dengan benar termasuk menyebutkan nama perusahaan, menawarkan bantuan dan menyampaikan tujuan, dan mencatat data penelepon.

2.1.4 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan

2.1.4.1 Pengertian Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang berfokus pada upaya membantu individu dalam mencegah serta menyelesaikan permasalahan sosial yang mereka alami, dengan tujuan memulihkan dan memperkuat kapasitas mereka dalam menjalankan peran sosial secara optimal. Selain itu, pekerjaan sosial juga dapat dipahami sebagai suatu lembaga sosial, profesi pelayanan kemanusiaan, serta praktik yang memadukan pendekatan ilmiah dan keterampilan teknis (Max Siporin dalam Dwi Heru Sukoco, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

2.1.4.2 Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial. Menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez dalam Heru Sukoco (2021) dalam menjalankan tugasnya, seorang pekerja sosial mempunyai peran-peran yang harus dijalankan. Peran tersebut antara lain:

1. Fasilitator: Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, pekerja sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

2. Broker (perantara): Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu menghubungkan orang dengan lembaga- lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Barang-barang dan pelayanan seperti makanan, uang, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan serta perawatan kesehatan, konseling, pengasuhan anak
3. Mediator (penghubung): Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “*win-win solution*”.
4. Pembela: Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.
5. Pelindung: Pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial.
6. Pendidik: Pekerja sosial dapat berperan menjadi pendidik untuk menutupi kekurangan klien dalam hal pengetahuan ataupun ketrampilannya. Pekerja

sosial bertindak sebagai pendidik sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial klien.

2.1.4.3 Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan

Pekerja sosial dalam pemberdayaan masyarakat menjalankan peran yang meliputi peran fasilitatif, edukasional, representasi, dan teknikal. Menurut Ife & Tesoriero (2016) terdapat empat peranan pekerjaan sosial dalam pemberdayaan, yaitu antara lain:

1. Peran fasilitatif

Peran fasilitatif mencakup berbagai aktivitas yang mendukung dan mendorong pengembangan masyarakat. Pekerja sosial dapat menggunakan berbagai keterampilan untuk merangsang dan mendukung dalam mempermudah jalannya suatu proses masyarakat. Keterampilan ini berfungsi sebagai alat yang mempercepat tindakan serta memperlancar pelaksanaan kegiatan. Dalam kategori ini, terdapat sejumlah keterampilan yang perlu dikuasai seperti animasi sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, membangun consensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan keterampilan dan sumberdaya, serta mengatur dan komunikasi personal.

2. Peran edukasional

Peran edukasional menuntut pekerja sosial untuk terlibat secara aktif dalam menyusun agenda kegiatan. Dalam peran ini, pekerja sosial perlu memberikan kontribusi positif yang terarah berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Pengembangan masyarakat merupakan proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus, di mana pekerja sosial secara konsisten belajar berbagai keterampilan baru, cara berpikir yang berbeda, perspektif

baru dalam memahami dunia, serta metode yang lebih efektif dalam berinteraksi dengan individu maupun kelompok. Keterampilan dalam menjalankan peran edukasional diantaranya adalah pemberian informasi, peningkatan kesadaran, konfrontasi, dan pelatihan.

3. Peran representasi

Peran representatif merujuk pada peran pekerja sosial dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal guna mewakili kepentingan masyarakat atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun sebagian besar aktivitas pekerja sosial berfokus pada komunitas itu sendiri, menjalin hubungan dengan sistem atau lembaga yang lebih luas juga merupakan hal yang penting. Keterampilan dalam peran representasi ini adalah mempeloreh berbagai sumberdaya, advokasi, menggunakan media, hubungan masyarakat, jaringan kerja, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman

4. Peran teknikal

Peran teknikal merujuk pada kemampuan pekerja sosial untuk memberikan bantuan praktis dan dukungan teknis langsung kepada masyarakat. Terdapat beberapa keterampilan yang perlu seorang pekerja sosial kuasai dalam menerapkan peran teknikal ini diantaranya penelitian, penggunaan computer, presentasi verbal dan tertulis, manajemen, dan pengaturan keuangan

2.1.4.4 Metode dan Pendekatan Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial dalam pendekatan tradisional berfokus pada tiga metode utama, yaitu *case work*, *group work*, dan *community organization* atau *community development* (Sukoco, 2021) berikut penjelasan metode tersebut :

1. Metode *case work* merupakan pendekatan yang digunakan untuk bekerja secara langsung dengan individu maupun keluarga melalui interaksi tatap muka. Tujuannya adalah membantu klien dalam mengatasi permasalahan pribadi atau keluarga secara lebih mendalam dan individual.
2. Metode *group work* memanfaatkan dinamika kelompok sebagai sarana untuk mendorong perubahan positif dalam diri anggotanya. Melalui proses dalam kelompok, individu didorong untuk meningkatkan kapasitas dan fungsi sosial mereka, baik secara emosional, sosial, maupun keterampilan interpersonal.
3. Metode *community organization* atau *community development* merupakan pendekatan berbasis komunitas yang bersifat lintas kelompok (*intergroup approach*), yang bertujuan menangani serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial berskala luas, termasuk permasalahan yang bersifat patologis atau kronis di masyarakat. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam merancang dan melaksanakan solusi kolektif terhadap persoalan yang mereka hadapi.